



## **POLITIK LUAR NEGERI TIMUR INDIA TERHADAP TAIWAN**

**Mohamad Dedy Kurmawan Jaya<sup>1)</sup>, Budi Pramono<sup>2)</sup>,**

**Rizerius Eko Hadi Sancoko<sup>3)</sup>, Wilopo<sup>4)</sup>**

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan,

Universitas Pertahanan RI

<sup>4)</sup> Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan RI

### **Abstrak**

Kebijakan luar negeri India terhadap Taiwan sebenarnya tidak terlalu menguntungkan bagi Negara India, akan tetapi sebagai negara besar berusaha untuk menjaga konstelasi pengaruh di kawasan Asia Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan luar negeri India tetap mempertahankan kerjasama dengan Taiwan melalui kebijakan "Act East". Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif terkait dengan analisis kebijakan luar negeri. Dalam analisis politik luar negeri "Act East" India terhadap Taiwan mencerminkan beberapa elemen konstruktivisme yang mencakup kebijakan yang mempengaruhi preferensi, dan kepentingan negara. Yang pertama, "Act East" India adalah ide untuk menghidupkan kembali hubungan strategis dan historis dengan Taiwan. Kedua, hubungan bilateral India-Taiwan yang positif membentuk pemahaman bersama berdasarkan nilai-nilai kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan norma. Ketiga, sinergitas sebagai emerging power menempatkan India untuk hidup berdampingan secara damai dengan Taiwan dan menjaga keamanan serta stabilitas di kawasan.

**Kata Kunci:** Konstruktivisme, Kebijakan Luar Negeri, Act East, India, Taiwan.

---

\*Correspondence Address : wilopo02@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i3.2025. 1220-1226

© 2025UM-Tapsel Press

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan luar negeri India, yang dikenal dengan Look East pada tahun 1990an, telah berubah menjadi kebijakan Act East pada masa pemerintahan Narendra Modi sejak tahun 2014. Hal ini berbeda dengan Kebijakan Look East dalam hal 'cakupan geografis' dan 'kedalaman strategis' (Vanvari & Tan, 2021).

Perubahan istilah tersebut menyiratkan bahwa India telah memperluas proyeksi kebijakan luar negerinya yang mencakup menjalin hubungan kerja sama dan menghidupkan kembali hubungan politik, memperkuat hubungan ekonomi, memperdalam keamanan regional, dan memastikan kerja sama strategis di Asia Tenggara, Pasifik, dan Asia Timur (Ekaputra & Hennida, 2021).

Di Asia Timur, Taiwan merupakan salah satu mitra Act East India di tengah tidak adanya hubungan diplomatik formal (Hashmi, 2020; Karackattu, 2019; Roy, 2022; Shah, 2018) dan berada di bawah “bayangan naga Tiongkok” (Nagda, 2020). India telah menjalin hubungan dan kerja sama bilateral dengan Taiwan sejak ditetapkan kebijakan Melihat ke Timur. Hal ini mencakup pembentukan Asosiasi India-Taipei (ITA) pada tahun 1995; dan pendirian Pusat Ekonomi dan Kebudayaan Taipei (TECC) di New Delhi (Chattaraj, 2019).

Kerjasama tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama di bidang bisnis, pariwisata, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertukaran antar manusia. Seiring dengan perkembangan, berbagai lembaga dan perjanjian yang disepakati kedua negara semakin meluas, antara lain “Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda” dan “Perjanjian Bantuan Bea Cukai” pada Juli 2011; pembukaan kantor kedua TECC di Chennai India pada bulan Desember 2012; pembukaan

kantor Dewan Pengembangan Perdagangan Eksternal Taiwan (TAITRA) dari Taiwan di beberapa wilayah India termasuk Delhi, Chennai, Kolkata dan Mumbai; dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kamar dagang Taiwan dan Kamar Dagang dan Industri India pada bulan Juni 2016 (Kementerian Luar Negeri, 2021). Serangkaian perjanjian dan lembaga memfasilitasi kerja sama ekonomi kedua negara.

Sejak diberlakukannya Kebijakan Bertindak ke Timur, India dan Taiwan diam-diam telah mengembangkan hubungan ekonomi yang kuat ditambah dengan perluasan interaksi politik di tengah “bayangan Tiongkok.” Pada bulan Desember 2021, kedua negara memulai negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas yang berfokus pada pengembangan India menjadi pusat manufaktur semikonduktor.

Menurut utusan Taiwan untuk India, perdagangan bilateral mencapai rekor baru pada tahun 2021 yaitu lebih dari \$7 miliar, dan lebih dari 120 perusahaan Taiwan beroperasi di India dengan investasi kumulatif lebih dari \$2,3 miliar (Smith, 2022). Kerja sama ekonomi lainnya antara India dan Taiwan adalah investasi. Total investasi yang datang dari Taiwan ke India pada tahun 2020 adalah \$11,1 miliar. Angka investasi dari Taiwan ke India ini masih cukup rendah mengingat aliran investasi yang dilakukan Taiwan ke negara dan wilayah lain pada tahun 2020, seperti ke Hong Kong dengan nilai investasi sebesar \$83,4 miliar, Korea Selatan sebesar \$32,4 miliar, Singapura sebesar \$32,3 miliar, dan Thailand \$19 miliar (Bank Dunia, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan India dan Taiwan juga masih tergolong rendah dan belum memberikan kontribusi yang

maksimal terhadap nilai kerja sama ekonomi bagi India.

Penelitian terkait hubungan India-Taiwan telah banyak dilakukan, antara lain The Case for a Pragmatic India-Taiwan Partnership pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa kerja sama kedua negara cenderung didominasi oleh kepentingan pragmatis (Karackattu, 2019).

Penelitian selanjutnya yang membahas tentang kerjasama India-Taiwan ditulis oleh Sriparna Pathak dengan judul India-Taiwan Economic Relations: Charting a New Path (Pathak & Hazarika, 2020) yang menekankan bahwa hubungan kedua negara didasarkan pada upaya memperkuat konektivitas ekonomi.

Kedua penelitian ini secara umum lebih menekankan pada dimensi material dibandingkan dimensi non material. Belum adanya penelitian kebijakan luar negeri Act East India terhadap Taiwan yang dikaji dari sudut pandang konstruktivis maupun dalam dimensi non-materi, mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh.

Dilihat dari data perdagangan, kerja sama kedua negara belum memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian India bahkan berkurang (Pant & Matto, 2022). Data perdagangan periode kebijakan Act East 2014-2021, kontribusi perdagangan India dengan Taiwan sebesar 0,8% atau \$49,9 miliar dari total perdagangan India.

India masih terus menjalin kerja sama dengan Taiwan meski belum memperoleh keuntungan yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa India tetap menjalin kerja sama dengan Taiwan melalui kebijakan "Act East" padahal nilai material yang dicapai jauh lebih rendah dibandingkan periode "Look East"?

Dibandingkan dengan teori hubungan internasional tradisional,

seperti Realisme dan Liberalisme, maksimalisasi keuntungan dan dimensi material selalu digunakan sebagai analisis utama kebijakan luar negeri serta preferensi, perilaku, dan pilihan kebijakan negara. Kebijakan Act East juga berisiko bagi India mengingat pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Timur. Apakah ada faktor non-materiil selain pertimbangan rasional yang mendorong India melakukan kerja sama dengan Taiwan di bawah bayang-bayang Tiongkok?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2014) adalah metode penelitian yang menggunakan ide-ide, asumsi dan kerangka pemikiran sebagai awal yang memengaruhi studi tentang permasalahan penelitian yang berhubungan tentang makna yang diberikan perorangan atau bersama terhadap suatu problema masyarakat atau sosial.

Subyek dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sedangkan Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pusat daripada kegiatan penelitian. Objek pada penelitian ini adalah politik luar negeri India terhadap Taiwan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan luar negeri diartikan sebagai serangkaian kepentingan, strategi, dan gagasan dalam berinteraksi dengan aktor atau negara lain yang digunakan untuk mencapai tujuan, serta sumber daya yang tersedia yang digunakan suatu negara dalam memandu interaksinya dengan negara lain (AS, 2018).

Dalam kajian konstruktivisme, politik luar negeri merupakan salah satu bentuk fenomena hubungan internasional yang tidak lepas dari unsur

ideasional yang terkandung di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Wendt yang menyatakan bahwa semua fenomena internasional seperti diplomasi, perang, perdamaian, dan lain sebagainya termasuk politik luar negeri merupakan konstruksi sosial yang dibuat oleh para aktor (Wendt, 1999). Dengan demikian, penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme dalam mengelaborasi kebijakan luar negeri Act East yang mencakup tiga aspek yaitu gagasan, proses intersubjektif, dan konstruksi identitas.

Pertama, struktur negara-negara kunci lebih ditentukan oleh intersubjektif dibandingkan oleh unsur-unsur material (Wendt, 1999). Ide menjadi unsur penting karena menentukan makna politik luar negeri. Pandangan konstruktivisme adalah bahwa semua fenomena di dunia bukanlah realitas material yang obyektif atau ada secara alami atau bawaan, tetapi selalu merupakan produk sosial dari peran ide (Wendt, 1995). Tanpa peran ide dan makna, politik luar negeri yang material tidak akan berarti apa-apa. Sebaliknya, ide tidak akan berfungsi atau menjadi tidak berarti jika tidak direpresentasikan dalam bentuk fisik atau nyata (Wendt, 1999).

Dalam konteks ini, gagasan atau gagasan mengenai politik luar negeri tidak lepas dari pengaruh sejarah, budaya, dan ideologi negara dari para aktor itu sendiri. Sebab faktor-faktor tersebut merupakan bagian dari unsur ideasional yang digunakan untuk menganalisis realitas sosial yang terjadi. Konstruktivis melihat kebijakan luar negeri sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial dengan unsur-unsur ideasional.

Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan Wendt, proses intersubjektif yang terjadi pada akhirnya membentuk tiga budaya interaksi antar aktor dalam sistem internasional, yaitu

budaya Hobbesian, Lockean, dan Kantian (Wendt, 1999, 2000).

Budaya Hobbesian didefinisikan sebagai situasi di mana negara-negara memandang satu sama lain sebagai musuh, sehingga mengakibatkan perang. Kebudayaan Lockean diartikan sebagai suatu keadaan dimana negara-negara memandang satu sama lain sebagai pesaing sehingga negara-negara saling berkompetisi untuk memajukan kepentingannya.

Budaya Lockean memicu ketegangan namun masih terbatas dengan tidak menjadikan perang sebagai tujuan akhir. Dan yang terakhir, budaya Kantian diartikan sebagai keadaan di mana negara-negara memandang satu sama lain sebagai teman, sehingga terjadi kerjasama (Hadiwinata, 2017; Jackson & Sorensen, 2016; Wendt, 1994). Ketiga, politik luar negeri sebagai representasi perilaku negara sejalan dengan identitas nasional yang diyakininya. sinergitas diartikan sebagai unsur persamaan ideasional yang dihasilkan oleh sejarah suatu negara dan interaksi suatu negara dengan negara lain. Identitas dan kepentingan negara sebagian besar dibangun oleh struktur sosial ini, bukan diberikan secara eksogen kepada sistem berdasarkan sifat manusia seperti yang diyakini oleh kaum neorealis atau politik dalam negeri yang didukung oleh neoliberalisme dalam hubungan internasional (Wendt, 1999).

Dengan kata lain, persepsi mereka terhadap dunia luar dibingkai oleh kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Sedangkan konstruktivis berpendapat bahwa identitas aktor bersifat heterogen karena budaya dan lingkungan internasional yang membentuk identitas mereka berbeda-beda (Ametbek, 2022). Hudson (1999) mengemukakan bahwa identitas nasional merupakan unsur ideasional yang dihasilkan oleh sejarah suatu negara yang berasal dari interaksi suatu

negara dengan negara lain dalam kurun waktu tertentu (Manikam & Puspitasari, 2021).

Secara lebih luas Reus-Smit menjelaskan bahwa identitas terbentuk dari gagasan, nilai, dan norma dari lingkungan sosial tempat negara bertindak sehingga kepentingan merupakan cerminan dari identitas yang diperoleh (Reus-Smit dikutip Permata, 2019). Oleh karena itu, hal ini menggambarkan bahwa identitas nasional menentukan kepentingan nasional dan perilaku negara sebagai norma sosial yang menjadi standar perilaku aktor negara dengan identitas yang diberikan (theys, 2017).

Konstruktivisme memberikan alternatif pemikiran dalam menganalisis pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Politik luar negeri East India Act menunjukkan bahwa hal tersebut tidak hanya sekedar upaya untuk mencapai kepentingan ekonomi, politik, dan militer yang material saja, namun dapat dikaji lebih dalam bahwa terdapat faktor non-material yang mendorong India melakukan internalisasi kebijakan luar negerinya terhadap Taiwan.

Penelitian ini akan melihat secara signifikan hubungan India dan Taiwan tanpa ikatan diplomatik formal. Oleh karena itu, fokus pembahasan hubungan India-Taiwan

Konstruktivisme memberikan alternatif pemikiran dalam menganalisis pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Politik luar negeri East India Act menunjukkan bahwa hal tersebut tidak hanya sekedar upaya untuk mencapai kepentingan ekonomi, politik, dan militer yang material saja, namun dapat dikaji lebih dalam bahwa terdapat faktor non-material yang mendorong India melakukan internalisasi kebijakan luar negerinya terhadap Taiwan.

Penelitian ini akan melihat secara signifikan hubungan India dan

Taiwan tanpa ikatan diplomatik formal. Oleh karena itu, fokus pembahasan hubungan India-Taiwan akan dikaji melalui pengembangan pendekatan konstruktivis dalam menganalisis politik dalam negeri dengan mengambil tiga aspek non-material dari kons Ide kebijakan Act East juga dipengaruhi oleh ikatan budaya. Konstruktivisme itu sendiri, yaitu gagasan, proses intersubjektif, dan gagasan kebijakan Act East juga dipengaruhi oleh ikatan budaya.

India memiliki ikatan budaya yang erat dengan Asia Tenggara dan Asia Timur. akan dikaji melalui pengembangan pendekatan konstruktivis dalam menganalisis politik dalam negeri dengan mengambil tiga aspek non-materi dari konstruktivisme itu sendiri, yaitu gagasan, proses intersubjektif, dan Misalnya India yang merupakan asal muasal agama Budha dan Hindu yang kemudian menyebar hingga ke banyak negara disekitarnya. itu dipengaruhi oleh agama-agama ini. Termasuk Taiwan yang dipengaruhi oleh agama Budha yang kini menjadi agama mayoritas masyarakat Taiwan (Madan et al., 2014).

Ikatan budaya dan agama yang terbentuk bukan sekedar hubungan sejarah masa lalu, melainkan sudah dianggap sebagai “hubungan yang hidup” dan “hubungan yang hidup”. warisan bersama” (Brahma, 2018; Hussain, 2017). Nah, inilah yang kemudian menjadi faktor yang digunakan dalam retorika kebijakan Act East untuk membangun rasa kebersamaan antara India dan negara-negara Asia Timur.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan luar negeri India melalui “ACT EAST” untuk tetap menjalin kerja sama dengan Taiwan disebabkan oleh tiga hal berikut.

Pertama, gagasan kebijakan Act East merupakan upaya India untuk menghidupkan kembali hubungan

dengan negara-negara di Asia Timur dan salah satunya adalah menghidupkan kembali hubungan bilateral dengan Taiwan yang telah terjalin sejak lama sebelum India merdeka.

Kedua, proses interaksi India-Taiwan menghasilkan pengertian hubungan keduanya sebagai hubungan persahabatan yang diwujudkan melalui frekuensi pertemuan keduanya, yang pada akhirnya membentuk proses intersubjektif atau pemahaman bersama tentang nilai-nilai kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum yang terus berkembang.

Ketiga, sinergitas yang merupakan identitas nasional India sebagai negara emerging power secara tidak langsung memberikan India tanggung jawab untuk menampilkan diri sebagai aktor yang menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan dan dunia.

Keberlangsungan kerja sama India dengan Taiwan tidak lain adalah upaya India untuk hidup berdampingan secara damai dengan Taiwan sebagai salah satu tugas sebagai emerging power. Terlebih lagi, memanasnya hubungan India dengan Tiongkok akibat konflik perbatasan yang belum membaik serta sikap Tiongkok yang dinilai India telah melakukan militerisasi di Selat Taiwan mendorong India untuk terus memperkuat hubungan dengan Taiwan.

Melalui pendekatan konstruktivisme, hubungan luar negeri India tidak hanya sekedar memperoleh keunggulan matematis namun tercipta karena adanya kesamaan nilai-nilai yang dijalin oleh kedua belah pihak. Ketegangan antara India dan Tiongkok akibat konflik perbatasan yang telah berlangsung selama puluhan tahun, tidak adanya kesamaan nilai kebebasan dan demokrasi, serta pertentangan aliansi antara keduanya memberikan nuansa konflik yang lekat dalam hubungan India-Tiongkok. India meyakini bahwa

saling pengertian antara India dan Taiwan mengenai nilai-nilai kebebasan dan demokrasi serta faktor sejarah yang erat antara keduanya menjadi landasan penting bagi keduanya untuk terus menjaga hubungan luar negeri yang semakin erat.

## REFERENSI

Ametbek, D. (2022, 23 Juli). Persepsi dan Konstruktivisme. Diakses pada 7 Agustus 2022, dari situs web AnkaraCenter for Crisis and Policy Studies: <https://www.ankasam.org/perception-and-constructivism/?lang=en#edn1>

AS, B. (2018). Kajian Kebijakan Luar Negeri dalam Hubungan Internasional. *Jurnal Ilmu Politik & Hubungan Masyarakat*, 06(04). doi: 10.4172/2332-0761.1000337

Bava, AS (2007). Peran India dalam Emerging World Order. *Makalah Pengarahan FES 4*, (Februari), 1–7. doi: 10.51879/pijssl/050301

Brahma, A. (2018). India's Act East Policy : the North-East States of India with 3 C's Formula. *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*, 7(9), 10023–10033. doi: 10.15680/IJIRSET.2018.0709018

Chattaraj, S. (2019). Kebijakan Bertindak ke Timur di India dan Kebijakan Baru Menuju Selatan di Taiwan adalah Saling Menguntungkan. *Pusat Timur Barat*, (489).

Chaudhury, DR (2014). Taiwan menaruh harapan pada kemenangan Narendra Modi untuk meningkatkan hubungan bisnis dengan India.

Cohen, SP (2001). *India: Kekuatan yang Muncul*. Washington, DC: Brookings Institution Press. doi:10.2307/20033062

Perekonomian negara. (2021). *PDB-Produk Domestik Bruto*.

Creswell, JW (2013). *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Vol. 19)*. California: Publikasi SAGE.

Ekaputra, S., & Hennida, C. (2021). *Atribut Nasional tentang Kebijakan Luar Negeri: Kebijakan India Bertindak Timur*.

Prosiding Konferensi Airlangga tentang Hubungan Internasional (ACIR), (Politik, Ekonomi, dan Keamanan dalam Mengubah Kawasan Indo-Pasifik), 575-580. Surabaya: SCITEPRESS. doi: 10.5220/0010280505750580Express News Service. (2011). Taiwan to set up industrial park near Ahmedabad.